



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

INDONESIA MEMASUKI PEMILU PUTARAN II

Ekonomi Politik: Kebijakan Penyediaan Pangan Beras
Supriyadi Wiryatmodjo

Wayang Topeng Glagahdowo
Kajian Etnografi Perubahan dan Fungsi Wayang Topeng
pada Masyarakat Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang,
Kabupaten Malang
Djoko Adi Prasetyo

Akomodasi Parpol Terhadap Kuota Perempuan
dalam Pemilu 2004
Dwi Windyastuti

Peran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora
bagi Liberasi dan Humanisasi Teknologi
Nasikun

Citra Perempuan Islam Kontemporer:
Representasi Perempuan Islam dalam Sinetron Ramadhan
Yuyun W.I Surya

Problema Budaya dalam P2KP/Proyek Penanggulangan
Kemiskinan di Perkotaan
Retno Andriati

Resensi Buku:
Presiden Golput
Herwanto, AM

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail: mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Dalam edisi kali ini redaksi sengaja melanjutkan edisi sebelumnya –Indonesia memasuki Pemilu Putaran I– dengan mengambil tema Indonesia memasuki Pemilu Putaran II. Seperti kita ketahui bersama dalam tahap terakhir “partai final” perebutan tampuk kekuasaan RI 1 akan muncul dan terpilih sang pemimpin yang mewakili kehendak suara rakyat –karena dipilih secara langsung. Seperti apakah bentuk pemerintahan dan siapa saja tokoh-tokoh yang dipilih untuk mendampingi sang presiden, tentunya akan dapat kita rasakan manfaatnya dengan capaian program-program pembangunan sang Presiden yang dilontarkan saat kampanye terdahulu. Bahkan beberapa pengamat dengan berani mencoba mengkritisi jalannya pemerintahan dalam evaluasi 100 hari untuk mencermati serta dengan tegas mendealade kinerja pemerintah.

Dengan adanya perubahan peta politik yang secara cepat, serta eskalasi suhu politik yang mulai memanasi. Beberapa tulisan yang diterima redaksi mencoba untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, apa yang terjadi ke depan dicoba untuk ditelaah dengan berkaca pada keberhasilan dan kegagalan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu. Secara pandangan ekonomi Supriyadi Wiryatmodjo mengupas masalah Ekonomi Politik Kebijakan Penyediaan Pangan Beras, dari segi gender Dwi Windyastuti mencoba mengemukakan gagasan Akomodasi Parpol terhadap Kuota Perempuan dalam Pemilu 2004, penerapan dari segi budaya diulas dengan gamblang dalam Problema Budaya dalam P2KP/Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan oleh Retno Andriati, serta resensi dari Herwanto mengenai Presiden Golput yang ditulis oleh Muhamad Asfar. Di luar tema, redaksi memuat Wayang Topeng Glagahdowo (Kajian Etnografi Perubahan dan Fungsi Wayang Topeng pada Masyarakat Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang) oleh Djoko Adi Prasetyo, Peran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora Bagi Liberasi dan Humanisasi Teknologi oleh Nasikun serta Citra Perempuan Islam Kontemporer: Representasi Perempuan Islam dalam Sinetron Ramadhan oleh Yuyun W.I Surya.

Semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat membawa angin segar perubahan serta menambah wawasan dan sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide untuk pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Topik Utama Edisi No. 1 (Januari) 2005:
Bencana, Solidaritas dan Integrasi Nasional

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Ekonomi Politik: Kebijakan Penyediaan Pangan Beras

Supriyadi Wiryatmodjo

1

Wayang Topeng Glagahdowo

Kajian Etnografi Perubahan dan Fungsi Wayang Topeng pada Masyarakat Desa Pulungdowo, Kecamatan Tumpang,

Kabupaten Malang

Djoko Adi Prasetyo

17

Akomodasi Parpol Terhadap Kuota Perempuan dalam Pemilu 2004

Dwi Windyastuti

37

Peran Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora bagi Liberasi dan Humanisasi Teknologi

Nasikun

51

Citra Perempuan Islam Kontemporer: Representasi Perempuan Islam dalam Sinetron Ramadhan

Yuyun W.I Surya

67

Problema Budaya dalam P2KP/Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Retno Andriati

83

Resensi Buku: Presiden Golput

Herwanto, AM

PRESIDEN GOLPUT

Penulis : Muhamad Asfar

Penerbit : Jawa Pos Press, Surabaya

Cetakan : Pertama, September 2004

Tebal : xi + 362 halaman

Peresensi : Herwanto, AM

Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Unair

Banyak warga negara Indonesia yang tidak tahu bahwa perilaku memilih dalam pemilihan umum (Pemilu) legislatif maupun presiden itu merupakan hak dan bukannya sebagai kewajiban. Hal tersebut terlebih-lebih pada pemilihan umum (Pemilu) pada masa orde baru, oleh karena itu kehadiran pemilih dalam pemilu rata rata lebih 90%. Kenyataan demikian ini tidak dapat begitu saja dimaknai bahwa kesadaran masyarakat dalam proses politik, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum sangat tinggi. Karena pada masa orde baru, seolah-olah mewajibkan setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih harus datang ketempat pemungutan suara untuk memilih, sedang mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) dianggap sebagai tindakan makar atau bahkan dikatakan subversif. Berbeda halnya ketika pemerintahan era reformasi, di mana pada pemilu tahun 1999 yang dapat digolongkan Golput sebanyak 10,4% kemudian pada pemilu tahun 2004 meningkat lebih dari 100%, yaitu sebanyak 24,74%. Meningkatkan jumlah pemilih Golput yang luar biasa tersebut mengisyaratkan telah terjadi perubahan besar tentang kesadaran

politik dari masyarakat Indonesia, terutama berkenaan dengan pemilu, sehingga menarik untuk dikaji.

Kehadiran buku yang berjudul *Presiden Golput* ini dapat dikatakan tema kajian yang bukan saja menarik dan aktual tetapi tergolong langka, sehingga dapat menambah ataupun memperluas perbendaharaan kajian ilmu politik pada khususnya dan ilmu sosial pada umumnya. Dalam buku ini penulis mengungkapkan fenomena Golput yang dapat dikatakan cukup komprehensif melalui kajian yang bersifat teoritik maupun empirik yang pantas dibaca oleh berbagai kalangan. Menurut penulis, Golput itu dapat diklasifikasikan kedalam tiga (3) kategori. *Pertama*, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap penguasa atau partai politik yang ada. *Kedua*, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti menusuk lebih dari satu tanda gambar. Dan *ketiga*, orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan jalan menusuk bagian putih kartu suara. (hlm. 12).

Penulis buku ini dalam memberikan gambaran tentang fenomena Golput baik

pada masa orde baru maupun pada era reformasi, menggunakan pendekatan sosiologis, psikologis dan politik dengan melalui data empirik. Data empirik diperoleh dari 6 (enam) aktivis atau pendukung golput pada masa orde baru dan 154 pemilih yang mengaku Golput pada pemilihan umum tahun 2004 yang dilakukan oleh Pusat Studi Demokrasi dan HAM bekerjasama dengan Institut Teknologi sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Dari pendekatan sosiologis, penulis memilih hubungan antara variabel status sosial ekonomi (tingkat pendidikan, pekerjaan dan pendapatan) terhadap perilaku pemilih. Pada pemilihan umum masa orde baru, dinyatakan bahwa sebagian besar golput didukung oleh pemilih yang tingkat pendidikannya cukup memadai, yaitu lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Perguruan Tinggi (PT), sedang pada pemilihan umum tahun 2004 lalu, golput tidak hanya dimonopoli oleh pemilih yang terdidik secara memadai tetapi juga mereka yang berpendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan. Kenyataan demikian ini menunjukkan semakin meluasnya keberanian masyarakat pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum. Sedang dari variabel pekerjaan, ditemukan bahwa para pendukung golput pada umumnya berasal dari pekerjaan non pegawai negeri sipil, non TNI/Polri. Dengan demikian tampak, bahwa para pendukung golput adalah para "pekerja bebas" (seperti wiraswasta/pedagang/sektor informal). Kenyataan demikian ini dengan mudah dapat dipahami, karena para "pekerja bebas" ini tidak terikat aturan kepegawaian atau komitmen-komitmen tertentu untuk menyalurkan aspirasi politiknya pada pemilihan saat

umum. Hal ini tentunya bukan satu satunya alasan, artinya masih banyak alasan mereka ini memilih golput, diantaranya adalah pertimbangan rasional ataupun pragmatis, yaitu mereka harus meninggalkan pekerjaan untuk mendatangi bilik pemilihan umum, berarti kehilangan pendapatan pada hari itu (hlm. 68).

Dari dimensi sosiologis ini pula dinyatakan bahwa golput merupakan fenomena orang berduit, artinya pendukung golput pada umumnya berpenghasilan cukup memadai I (mandiri). Gejala demikian mereka ini dapat dimaknai bahwa pemilih yang tingkat ekonominya menengah ke atas (memadai) lebih mempunyai keberanian untuk berperilaku tidak memilih atau golput. Keadaan yang demikian ini berkaitan erat dengan pandangan kebanyakan masyarakat Indonesia yang memberikan penilaian terhadap orang golput itu itu acapkali diberi predikat sebagai perilaku "menyimpang". Oleh karena itu perilaku golput dibutuhkan keberanian untuk mengambil resiko, termasuk resiko ekonomis bila seseorang itu menunjukkan jati dirinya sebagai pendukung golput. Lebih-lebih dikalangan pegawai kantor terutama pegawai negeri/TNI/Polri, sangat diperlukan keberanian yang ekstra untuk menanggung resiko akibat perilakunya sebagai pendukung golput (hlm. 75).

Kemudian dari aspek psikologis, penulis memilih variabel kepribadian untuk dikaitkan dengan perilaku memilih dalam pemilihan umum. Ditemukan bahwa pada umumnya perilaku golput itu berkepribadian toleran dan tidak otoriter, artinya bahwa para pendukung golput itu sangat terbuka terhadap saran dan kritik dari orang lain serta menerapkan prinsip prinsip demokrasi dalam berperilaku atau

menjalankan roda organisasi (hlm.100). Sementara itu, dari sisi orientasi kepribadian, para pemilih golput pada umumnya berorientasi pada kepribadian anomi, teralienasi dan tidak apatis. Pemilih yang berkepribadian anomi, pada umumnya merasa tidak berguna — karena berbagai aspirasi politik yang diperjuangkan tidak pernah terealisasi; merasa aktivitas politiknya atau aktivitas politik yang dilakukan orang lain — sebagai sesuatu yang sia-sia karena merasa tidak mampu mempengaruhi proses politik.(hlm. 103). Pemilih yang berorientasi pada kepribadian alienasi biasanya merasa tidak terlibat atau tidak dilibatkan dalam proses politik baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Sedang pemilih yang berorientasi pada kepribadian tidak apatis, biasanya mempunyai minat pada persoalan persoalan politik, seperti kegiatan memberuikan advokasi, pemberdayaan masyarakat, lobi-lobi dengan pejabat pemerintah maupun DPR/DPD, bahkan sering terlibat dalam kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi.

Selanjutnya penulis mengungkapkan bahwa perilaku golput itu tujuan utamanya adalah untuk merefleksikan banyak pesan. Pesan pesan itu diantaranya :

Pertama, protes terhadap sistem politik, baik pada masa orde baru maupun pada era pemerintahan reformasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan para pendukung golput kecewa terhadap sistem politik yang ada, terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakan tersebut. Seperti diantaranya sistem politik yang sedang dikembangkan oleh penguasa sekarang dinilai tidak mampu membangun demokrasi yang sehat, baik pada tingkat

elit maupun massa. Ditingkat elit misalnya, para pendukung golput menilai ada kolusi, kongkalingkong antara pemerintah disatu sisi dan DPR disisi lain. DPR tidak mampu melakukan fungsi kontrolnya secara efektif terhadap pemerintah. Selain itu para pendukung golput juga kecewa dengan sistem politik yang sedang dikembangkan oleh bangsa ini, dengan tidak memberi kewenangan yang memadai terhadap dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagaimana hasil amandemen UUD 1945, mulai Pemilu 2004 terdapat lembaga baru yang mengarah pada sistem dua kamar, yaitu DPD dan DPR. Kekecewaan terhadap sistem politik itu kemudian melahirkan ketidakpercayaan para pendukung golput terhadap sistem politik, terutama berkaitan dengan faktor: (1). Tidak berfungsinya lembaga lembaga perwakilan rakyat khususnya DPR/MPR. (2). Tidak berfungsinya lembaga peradilan, baik dimasa orde baru maupun di era reformasi. (3). Praktek praktek, korupsi, kolusi dan nepotisme baik dimasa orde baru maupun di era reformasi. (4). Praktek-praktek kebohongan dan inkonsistensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah orde baru maupun di era reformasi. (5). Berbagai kebijakan politik pemerintahan yang tidak kondusif bagi proses demokras di Indonesia (hlm.177).

Kedua, sikap golput juga berkaitan dengan persepsi dan evaluasi terhadap sistem pemilu dan penyelenggaraan pemilu baik pada masa orde baru maupun pada era reformasi. Sikap golput terhadap pemilu tahun 2004 yang dinilai tidak mencerminkan kemauan rakyat tetapi didasarkan pada kemauan elit elit partai. Karena itu, pemilu lebih dimaknai sebagai sarana untuk mempertahankan status quo penguasa dibandingkan sebagai sarana

untuk melakukan perubahan politik bahkan dalam beberapa kasus, para pendukung golput menilai bahwa sistem pemilu 2004 mengalami kemunduran dibanding pemilu sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa para pendukung golput menilai sistem pemilu 2004 tidak menjamin terciptanya anggota DPR/DPRD yang akuntabel sekaligus tidak menjamin adanya perubahan politik yang berarti pada pasca pemilu 2004.

1. Dipertahankannya sistem pemilu proporsional dinilai oleh sebagian pendukung golput sebagai bukti tidak akan terciptanya akuntabilitas anggota Dewan sekaligus tidak akan terjadinya perubahan politik pasca pemilu 2004.
2. Sebagai implikasinya, sistem proporsional terbuka dianggap tidak menjamin kedekatan hubungan antara wakil dan terwakil, antara anggota DPR/DPRD dengan rakyat, antara partai politik dengan pendukungnya, antara anggota DPR/DPRD dengan kontituennya karena tidak dilakukan secara benar.
3. Para pendukung golput juga kecewa dengan tidak adanya ketegasan tentang ketentuan 30% bagi caleg perempuan.

Setidaknya ada 4 (empat) alasan bagi para pendukung golput yang menggunakan cara tidak menghadiri tempat pemungutan suara. *Pertama*, sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik. Bagi pendukung golput, pemerintah telah gagal membawa amanat rakyat dan tuntutan reformasi. Pemerintah tidak sanggup memperbaiki kondisi ekonomi yang terpuruk sejak pertengahan 1997, dan gagal membangun kehidupan politik yang

demokratis. Oleh karena itu, tindakan untuk tidak mendatangi tempat pemungutan suara itu diharapkan dapat menyadarkan para pejabat negara, elit politik, anggota DPR/D dan aktivis partai bahwa perilaku mereka selama ini tidak mendapat simpati dari rakyat. *Kedua*, ketidakhadiran dalam bilik suara disebabkan tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu yang terjadi. Bagi pendukung golput semacam ini, aktivitas pemilu dengan menghadiri tempat pemungutan suara atau kampanye menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian finansial, tenaga dan waktu. *Ketiga*, ketidakhadiran ketempat pemungutan suara itu disebabkan karena ada urusan yang lebih penting daripada mendatangi ke bilik suara tetapi tidak ada nilai lebih atau tidak membawa perubahan apapun, lebih baik melaksanakan aktivitas yang dianggap lebih menguntungkan secara finansial. Dan *keempat*, ketidakhadiran kebilik suara hanya karena malas saja, artinya bila datang ke tempat pemungutan suara merasa tidak ada artinya, sehingga lebih baik dirumah nonton televisi, istirahat dirumah atau menikmati hari libur dengan mendatangi tempat rekreasi.

Sedang pertimbangan para pendukung golput yang mengekspresikan perilakunya dengan mencoblos lebih dari satu tanda gambar, memasukkan kartu suara kosong atau mencoblos bagian putih dari kertas suara adalah: *pertama*, adalah manifestasi protes terhadap pemerintah, anggota DPR/D dan partai politik. *Kedua*, agar kertas suaranya tidak disalah gunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. *Ketiga*, untuk memberikan dorongan dan keberanian kepada public agar berani menunjukkan

sikap protes mereka dengan cara merusak kartu suara. *Keempat*, agar partai politik dan kandidatnya memperhitungkan keberadaan golput. Karena selama ini ada kesan partai politik menganggap golput sebagai perilaku menyimpang tak ubahnya perilaku kejahatan dan dianggap berbahaya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum disebutkan adanya sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengajak pihak lain untuk tidak memilih atau golput. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa alasan para pendukung golput itu sangat bervariasi yang seiring dengan bentuk ataupun klasifikasi golput.

Selanjutnya dikemukakan juga dalam buku ini, bahwa banyaknya jumlah pemilih golput itu dapat merupakan ancaman dan tantangan. Ancaman itu setidaknya akan dirasakan oleh tiga kelompok. *Pertama*, partai politik merupakan pihak yang paling dirugikan, terutama partai politik yang berkuasa. *Kedua*, adalah pemerintah karena dengan banyaknya pemilih golput itu sebagai tanda rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah. *Ketiga*, anggota DPR/DPRD akan menghadapi masalah berkaitan dengan legitimasi politik. Sedang yang paling diuntungkan dari banyaknya jumlah pemilih golput adalah partai politik non pemerintah atau capres yang bukan *incumbent*, terutama partai politik baru. Bagi partai politik non pemerintah atau capres yang bukan *incumbent*, pendukung golput dapat merupakan pasar potensial bagi partainya. Kelompok pendukung golput merupakan lahan garapan baru yang dapat ditarik menjadi pemilihnya. Walaupun untuk menarik para pendukung golput tersebut bukan merupakan pekerjaan yang

mudah. Karena mereka ini merupakan kelompok yang kecewa atau dikecewakan oleh partai politik yang berkuasa. Sehingga untuk membangun kepercayaan kembali kalangan pendukung golput benar-benar memerlukan kerja ekstra (hlm. 333).

Kemudian apakah keuntungan dan kerugian banyaknya pemilih golput? Keuntungannya antara lain, perilaku golput dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada pemerintah dan partai yang berkuasa serta elit politik bahwa mereka tidak layak lagi dipercaya oleh rakyat, tidak patut untuk memegang jabatan untuk kedua kalinya, dan sebagainya. Sehingga dengan pilihan politik sebagai golput, para penguasa dapat memahami eksistensi pendukung golput sebagai warga negara yang mempunyai prinsip politik yang perlu diperhatikan. Dengan harapan melalui sikap semacam ini, maka para politisi sadar kemudian memperbaiki diri. Sedang kerugiannya, banyaknya ketidakhadiran para pemilih kritis (golput), sebenarnya kurang menguntungkan bagi perkembangan demokrasi Indonesia kedepan. Dalam situasi demokrasi yang sudah tumbuh dan proses pemilu telah berjalan secara *free and fair*, banyaknya pemilih golput dalam pemilu sebenarnya kurang menguntungkan bagi perkembangan demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi memerlukan proses *checks and balances* yang sehat, antara lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi juga antara elit dan massa, antara partai dan konstituennya dan antara kandidat dengan pemilihnya, antara wakil dan rakyatnya. Disinilah sebenarnya terjadi kontrak sosial baru. Rakyat menggadaikan sebagian kewenangan politiknya kepada elit dan partai politik,

sementara itu, partai politik dan elit mempunyai mandat untuk bekerja atas nama kontituennya.

Buku ini sebagai hasil dari kajian ilmiah disamping kelebihan kelebihan yang dimilikinya, ada pula sedikit catatan kecil dinataranya dari aspek metodologis, penelitian yang barangkali dapat digolongkan deskriptif ini berusaha untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang fenomena golput di Indonesia baik pada masa orde baru maupun pada era reformasi. Sementara itu, data empirik yang dipergunakan untuk menjelaskan fenomena Golput tersebut terdiri dari enam (6) informan yang tidak jelas siapa?, berasal dari mana? Dan pertimbangan metodologis macam apa

yang digunakan untuk menentukan ia dapat jadi informan? Serta 154 responden yang mengaku Golput pada pemilu tahun 2004, juga belum atau tidak tampak aspek metodologisnya juga dari hasil penelitian terhadap 2.332 pemilih di Surabaya pada tahun 2003 yang tidak dirancang khusus untuk penelitian Golput ini, bagaimana dapat dimanfaatkan untuk dapat menjelaskan perilaku memilih pada pemilu tahun 2004.

Karya ini pada dasarnya terpolung dari interpretasi dari para pembaca buku ini, namun sekali lagi perlu dinyatakan bahwa buku ini adalah baik untuk dijadikan referensi dari berbagai kalangan serta memadai untuk dijadikan referensi pada kajian serupa pada masa mendatang.